

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai kebutuhan SAK ETAP ini bagi UKM, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zahro, Wahyundaru (2015), dengan judul “Determinan Kebutuhan SAK ETAP bagi UKM (Studi Empiris pada UKM Makanan di Kota Semarang)” dengan tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara pendidikan, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, sosialisasi SAK ETAP, skala usaha terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pendidikan pemilik, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan skala usaha berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM. Pendidikan berpengaruh dikarenakan pendidikan dapat berfungsi meningkatkan produktivitas dan berperan sebagai sinyal kemampuan untuk lebih meningkatkan kemajuan perusahaan (UKM) termasuk melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan rutin sesuai dengan SAK ETAP. Karakteristik laporan keuangan dalam SAK ETAP telah menyebutkan berbagai keadaan yang harus ada dalam laporan keuangan, sehingga dengan memenuhi karakteristik tersebut diharapkan dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu UKM. Skala usaha hal ini dapat terjadi karena ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait kelangsungan usahanya sehingga diharapkan mempunyai pemahaman yang lebih

baik mengenai SAK ETAP. Faktor lainnya yaitu pemahaman terhadap teknologi informasi dan sosialisasi SAK ETAP tidak berpengaruh karena faktor tersebut kurang mendorong UKM untuk memahami pentingnya kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Soraya dan Mahmud (2016), dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”. Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara tingkat pendidikan pemilik, ukuran usaha, dan umur usaha terhadap kebutuhan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Hasil dari penelitian menunjukkan, tingkat pendidikan pemilik dan ukuran usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, hal ini didasarkan karena keberhasilan seorang pemilik usaha tergantung pada pendidikan dan kemampuan belajarnya dalam lingkungan usaha, selain itu juga semakin besar skala usaha maka pemilik memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya (*growth*) dan menjaga eksistensi usahanya. Dalam penelitian ini umur usaha tidak berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, hal ini bisa jadi karena meskipun usaha yang dijalankan telah berlangsung lama pemilik usaha tidak memperhatikan pencatatan akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Maharani (2015), dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember)”. Tujuan dari penelitian adalah untuk

membuktikan dan menganalisis pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan pemilik UKM, jenjang pendidikan pemilik UKM, lama usaha, ukuran usaha terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP. Hasil penelitian diketahui bahwa, pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP hal ini karena, UKM yang pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan khusus terkait SAK ETAP maka pemilik memiliki kemauan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan informasi yang diberikan tentang apa SAK ETAP bagi UKM merupakan suatu faktor yang menentukan pemahaman UKM atas SAK ETAP. Latar belakang pendidikan dan ukuran usaha juga berpengaruh terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP, karena pengusaha UKM dengan latar pendidikan Akuntansi akan memiliki pemahaman SAK ETAP yang lebih baik dibandingkan dengan pengusaha UKM dengan latar belakang pendidikan Non Akuntansi, selain itu jika ukuran usaha suatu UKM tinggi maka cenderung memiliki pendapatan yang tinggi pula, sehingga semakin baik pemahaman UKM atas SAK ETAP. Dapat dinyatakan bahwa pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan dan ukuran usaha merupakan suatu faktor yang menentukan pemahaman UKM atas SAK ETAP. Jenjang pendidikan dan lama usaha tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman UKM atas SAK ETAP, jenjang pendidikan dan lamanya UMKM berusaha tidak menentukan tinggi rendahnya pemahaman UKM atas SAK ETAP.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Suryanti, dkk. (2014), dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-

ETAP) pada Koperasi di EKS-Karisedenan Banyumas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan koperasi-koperasi yang ada di eks-Karesidenan Banyumas dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam penyajian laporan keuangannya. Hasil penelitian menunjukkan, ada beberapa koperasi yang masih menggunakan PSAK 27 serta penyajian laporan akuntansi sederhana yang dirasa kurang lengkap, selain itu laporan keuangan sebagian besar koperasi belum sesuai dengan SAK ETAP, hal ini karena penggunaan software akuntansi juga kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta sumber daya manusianya kurang kompeten di bidang akuntansi, namun ada juga koperasi yang secara tegas menyatakan sudah menerapkan SAK ETAP dan dilain pihak sebagian koperasi di eks Keresidenan Banyumas sudah bertahap untuk menggunakan SAK ETAP.

Penelitian yang dilakukan AUFAR (2013), dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UKM (Survei pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung)”. Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara jenjang pendidikan pemilik, ukuran perusahaan, lama usaha dan latar belakang pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan semua kemungkinan faktor yang disebutkan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM, yaitu faktor jenjang pendidikan pemilik, ukuran usaha, lama usaha dan latar belakang pendidikan. Perkembangan dan persaingan usaha yang sangat pesat memaksa para pemilik UKM untuk mengembangkan usaha dan masalah permodalan sering menjadi

kendala bagi para pemilik UKM, untuk itulah dengan adanya informasi akuntansi yang baik diharapkan pengusaha UKM berkembang dan *Survive* didalam persaingan bisnis yang sangat ketat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Hanafi (2016), dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempegaruhi penerapan SAK ETAP pada UKM, apakah faktor pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, ukuran usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP pada UKM. Hasil penelitian menunjukkan, pendidikan memiliki pengaruh terhadap penerapa SAK ETAP pada UKM, tingkat pendidikan formal yang rendah (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) manajer atau pemilik maka akan rendah pula penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi (SMA, Sarjana dan sederajat). Pemahaman teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK ETAP pada UKM kondisi demikian menunjukkan bahwa seorang pemilik UKM yang mempunyai pemahaman mengenai taknologi informasi yang lebih baik cenderung menginginkan untuk dapat menggunakan SAK ETAP dengan lebih baik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap penerapa SAK ETAP kondisi demikian menunjukkan bahwa UKM yang mempunyai karakteristik kualifikasi laporan keuangan yang lebih rumit yang tentunya memerlukan penerapan prosedur yang lebih baik. Ukuran usaha memiliki

pengaruh terhadap penerapan SAK ETAP Kondisi demikian menunjukkan bahwa ukuran usaha UKM akan menjadikan ketertarikan yang lebih besar bagi UKM untuk menerapkan SAK ETAP.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan memiliki persamaan dalam penelitian yang sekarang yaitu pada objeknya yakni penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada UKM dan pada metode analisis yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda, sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan dan studi empirisnya atau penentuan lokasi yang akan digunakan untuk penelitian.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. *Grand Theory*

2.2.1.1. Teori Entitas

Teori entitas menekankan bahwa perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik (Ghozali dan Chariri, 2014:296).

Pada penelitian ini, implikasi dari teori entitas adalah teori entitas menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri, penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal

dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang.

Dengan mengimplementasikan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan, UMKM dapat memenuhi syarat untuk memperoleh kebutuhan modal (pengajuan kredit), dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi modal. Serta dengan menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP, dapat mencerminkan adanya pemisah antara keuangan perusahaan dengan uang pribadi, karena perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik.

2.2.1.2. *Human Capital Theory*

Human Capital Theory dikembangkan oleh Becker (1965) yang mengemukakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan *human capital* adalah penting sebagai suatu investsi dari bentuk-bentuk modal lainnya. *Human Capital Theory* berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan kapitas belajar dan produksinya.

Human Capital Theory adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan

sebagainya. *Human capital* dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, *skill*, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.

Implikasi *Human Capital Theory* dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik UKM juga merupakan penentu untuk memberikan persepsi akan pentingnya kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM.

2.2.1.3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Teori ini dirumuskan dengan empat macam penentu inti (*core determinant*) suatu niat dan pengguna teknologi informasi dengan empat moderator dari hubungan pokok (*key relationships*) (Vankatesh dkk., 2003 dalam Winarko dan Mahadewi (2013). Keempat *core determinant* yang dimaksud adalah pertama, ekspektasi terhadap kinerja (*performance expectancy*), yaitu sejauh mana suatu individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya untuk mencapai hasil-hasil dalam kinerja pekerjaannya. Kedua, ekspektasi terhadap upaya (*effort expectancy*), yaitu sejauhmana tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan dari sistem. Ketiga, pengaruh sosial (*social influence*), yaitu sejauh mana persepsi suatu individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru. Keempat, kondisi yang mendukung (*facilitating condition*), yaitu sejauhmana suatu individu percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis harus ada untuk mendukung penggunaan sistem.

Pada penelitian ini, implikasi dari teori ini adalah digunakan sebagai landasan teori untuk memperkuat kerangka berfikir Pemahaman Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, karena

melalui pemahaman teknologi informasi yang dimiliki pemilik dapat mempengaruhi persepsi pemilik UKM untuk menerapkan SAK ETAP. UTAUT merupakan teori yang cukup komprehensif dalam mengintegrasikan konstruksi faktor-faktor yang menentukan seseorang atau sebuah organisasi didalam mengadopsi teknologi baru. Suwardjono (2005 dalam Yanto dkk., 2016), menyatakan bahwa akuntansi merupakan soft technology, hal tersebut mendukung teori UTAUT untuk digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

2.2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.2.1. Definisi SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan itu sendiri menurut Augustyas (2011), merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan,

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.

2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

Dapat disimpulkan bahwa, ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat (karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal) atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas.

2.2.2.2. Manfaat dan Tujuan SAK ETAP

SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu SAK ETAP juga bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.

Manfaat dari penerapan SAK ETAP, diantaranya adalah :

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil, menengah, mampu untuk; menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan

mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari bank) untuk pengembangan usahanya.

2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK umum sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
3. Meskipun sederhana, tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan (Amri, 2015).

Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunaannya yang merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku.

2.2.2.3. Penerapan SAK ETAP

Penerapan SAK ETAP dapat dilakukan secara Restropektif dan Prospektif. Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Sedangkan penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya (Gracetine, 2013).

Entitas dapat menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- a. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP;
- b. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan tersebut;
- c. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
- d. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Penerapan SAK ETAP akan lebih mudah bagi UKM, karena SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum; sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi; dan cenderung tidak berubah selama beberapa tahun (Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

2.2.2.4. Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK

Penerapan SAK ETAP dengan PSAK berbeda, karena SAK ETAP dimaksudkan untuk memudahkan UKM, adapun perbedaannya yaitu :

1. Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK *complicated* dan rumit.
2. SAK ETAP cenderung menggunakan basis *stewardship* sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada *steakholder* sehingga cenderung menggunakan prinsip *realibility*, sedangkan PSAK telah bergeser untuk pemenuhan user dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.
3. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan.
4. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
5. SAK ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
6. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
7. SAK ETAP hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tak berwujud dan properti investasi. PSAK boleh memilih cost model atau model revaluasi (Umar, 2014).

Tabel 2.1
Perbedaan Laporan Keuangan SAK ETAP dengan PSAK

SAK ETAP	PSAK
Neraca	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan Laba Rugi	Laporan Laba Rugi Komprehensif
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan
	Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif untuk penyajian kembali

Sumber : Gracetine, 2013

2.2.3. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

2.2.3.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

2.2.3.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan haruslah :

1. Dapat Dipahami; Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.
2. Relevan; Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Materialitas; Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
4. Keandalan; Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Substansi Mengungguli Bentuk; Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
6. Pertimbangan Sehat; Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
7. Kelengkapan; Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
8. Dapat Dibandingkan; Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
9. Tepat Waktu; Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat; Informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.2.3.3. Posisi Keuangan

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
- b) Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Beberapa pos mungkin memenuhi definisi aset atau kewajiban namun tidak dapat diakui sebagai aset atau kewajiban dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria pengakuan. Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari dalam entitas harus cukup pasti untuk memenuhi kriteria probabilitas sebelum suatu aset atau kewajiban diakui (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

2.2.3.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai berikut:

- (a) Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

- (b) Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

2.2.3.5. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

Unsur-unsur dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai berikut:

- 1) Aset;

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

- 2) Kewajiban;

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3) Penghasilan;

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban;

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5) Laba atau Rugi;

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan "*matching concept*". Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh SAK ETAP (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

2.2.3.6. Bentuk Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dipersiapkan sesuai dengan SAK ETAP adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan entitas meliputi :

1) Neraca;

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut.

2) Laporan laba rugi;

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi. Unsur – unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.

3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:

- a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

4) Laporan arus kas;

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5) Catatan atas laporan keuangan;

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas.

Suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama (Sumber : Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).

2.2.4. Usaha Kecil Menengah (UKM)

2.2.4.1. Definisi UKM

Usaha Kecil Menengah atau disingkat UKM adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Secara umum ciri ciri UKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional (Arto, 2016).

2.2.4.2. Karakteristik UKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam

menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Dalam perspektif usaha, UKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities* atau dikenal sebagai UKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* atau UKM Mikro adalah para UKM dengan kemampuan sifat pengerajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) *Small Dynamic Enterprise* atau Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “*Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.*” (Sumber : Profil Bisnis UMKM-LPPI&BI, 2015).

Tabel 2.2
Karakteristik UKM

UKURAN USAHA	KARAKTERISTIK
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. ▪ Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. ▪ Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. ▪ Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. ▪ Sudah membuat neraca usaha. ▪ Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. ▪ Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha. ▪ Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. ▪ Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. ▪ Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi. ▪ Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi

Usaha Menengah	<p>dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. ▪ Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. ▪ Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. ▪ Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. ▪ Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
----------------	---

Sumber : Profil Bisnis UMKM-LPPI&BI, 2015

2.2.4.3. Peluang Bisnis UKM

Usaha Kecil Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. UKM relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar, karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing, sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Beberapa kontribusi positif UKM diantaranya :

1. Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan (99,9%);

2. Menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp4.869,57 Triliun), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun;
3. Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp166,63 triliun) dari total ekspor nasional;
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33% (Rp830,9 triliun);
5. Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Multiplier effect-nya tinggi. Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat;
6. Wadah untuk penciptaan wirausaha baru;
7. Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa. (Sumber : Profil Bisnis UMKM-LPPI&BI, 2015).

Tabel 2.3
Aspek Lingkungan Strategis

Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC yang akan menciptakan peluang baru bagi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB ▪ Pengembangan UMKM hanya membutuhkan tingkat investasi yang lebih rendah ▪ Kontribusi UMKM dalam ekspor non migas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sektor UMKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja ▪ Penekanan pengangguran menjadi wahana bangkitnya wirausaha

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM 2012

2.3. Hipotesis

2.3.1. Hubungan Pemahaman Teknologi Informasi dengan Kebutuhan SAK ETAP bagi UKM

Teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat telah mengenal dan merasakan langsung manfaat dari perkembangan teknologi informasi pada kehidupannya. Bisnis atau sebuah usaha adalah salah satu bagian hidup masyarakat yang sangat terpengaruh terhadap perubahan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri dalam bisnis. Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan dapat tertinggal dari pesaingannya apabila tidak menguasai atau menerapkan teknologi informasi dalam industrinya.

Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Agar pemilik UKM dapat menjalankan tugasnya dan berkerja sama dengan baik maka diperlukan suatu pemahaman mengenai pentingnya teknologi informasi untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi atau informasi akuntansi berbasis teknologi, sebab informasi akuntansi (sesuai dengan standar yang berlaku) dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta mencapai efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha. Pemilik UKM dengan kadar pemahaman teknologi yang tinggi mempunyai kemungkinan mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi secara intensif. Semakin tinggi tingkat pemahaman pemilik UKM mengenai teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan mereka terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi informasi di dalam kehidupan berbisnis, selain itu dapat mendorong UKM untuk mempercepat penyediaan informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Pratiwi dan Hanafi, 2016).

Peningkatan keterampilan dan pemahaman terhadap teknologi informasi pada pemilik UKM dalam suatu usaha menjadi persyaratan inti dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha (Sariningtyas dan Diah, 2011), untuk itulah pemahaman terhadap teknologi informasi diduga berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Hanafi (2016), menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, karena seorang pemilik UKM yang mempunyai pemahaman

mengenai teknologi informasi yang baik cenderung menginginkan untuk dapat menerapkan SAK ETAP. Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian penjelasan di atas maka dapat diperoleh hipotesis bahwa,

H1 : Pemahaman Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

2.3.2. Hubungan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan dengan Kebutuhan SAK ETAP bagi UKM

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Dalam menyusun laporan keuangan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Warsono dkk, 2010:131).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disebutkan bahwa suatu laporan keuangan haruslah dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan biaya dan manfaat. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam SAK ETAP telah menyebutkan berbagai keadaan yang harus ada dalam laporan keuangan sehingga dengan memenuhi karakteristik tersebut diharapkan UKM dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan (Sariningtyas dan Diah W, 2011).

Penelitian yang dilakukan Zahro dan Wahyundaru (2015) serta penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Hanafi (2016), menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, karena UKM yang mempunyai karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang lebih rumit yang tentunya memerlukan penerapan prosedur yang lebih baik. Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian penjelasan di atas maka dapat diperoleh hipotesis bahwa,

H2 : Karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

2.3.3. Hubungan Ukuran Usaha dengan Kebutuhan SAK ETAP bagi UKM

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Menurut Holmes dan Nicholls (1988), ukuran usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Ukuran usaha dapat dinilai berdasarkan tingginya tingkat penjualan, tingginya total aset yang dimiliki, banyaknya jumlah tenaga kerja, dan lain sebagainya, yang semuanya berkorelasi tinggi (Machfoedz, 1994 dalam Okkarisma, 2010).

UKM yang memiliki ukuran usaha besar cenderung berpotensi mempunyai sumber daya yang besar pula, selain itu juga mampu memperkerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik (Zahro dan Wahyundaru, 2015). Semakin besar ukuran usaha maka pemilik dianggap semakin matang dalam menjalankan usahanya. UKM dengan ukuran usaha yang besar diharapkan pemiliknya mempunyai pemahaman terhadap SAK ETAP, karena pemilik usaha akan berusaha untuk mengelolah usahanya dengan baik agar terus berkembang dan dapat bertahan dalam persaingan bisnis.

Ukuran usaha juga dapat mempengaruhi pemikiran pemilik usaha terkait dengan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga mendorong pemilik suatu usaha untuk berpikir dan belajar terkait dengan solusi untuk menghadapinya, karena semakin tingginya tingkat transaksi maka akan semakin rumit pula pencatatannya, untuk itu agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar dibutuhkan pedoman pencatatan yang dapat membantu menyusun suatu laporan keuangan yaitu SAK ETAP.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar pelaporan keuangan yang memang diperuntukkan bagi entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti UKM, sehingga diharapkan SAK ETAP dapat diterapkan oleh pemilik UKM sebagai solusi atas tingginya tingkat transaksi perusahaan. SAK ETAP memberikan banyak kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan dibandingkan PSAK dengan ketentuan lebih kompleks, SAK ETAP cenderung lebih sederhana. Semakin tingginya ukuran perusahaan diharapkan SAK ETAP semakin dibutuhkan untuk pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahri (2014) menyatakan bahwa, ukuran usaha berpengaruh terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM, karena semakin besar jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang tertanam dalam perusahaan tersebut, semakin banyak penjualan yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar sehingga memungkinkan perusahaan

menerapkan SAK ETAP. Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian penjelasan di atas maka dapat diperoleh hipotesis bahwa,

H3 : Ukuran usaha berpengaruh positif terhadap kebutuhan SAK ETAP bagi UKM.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

